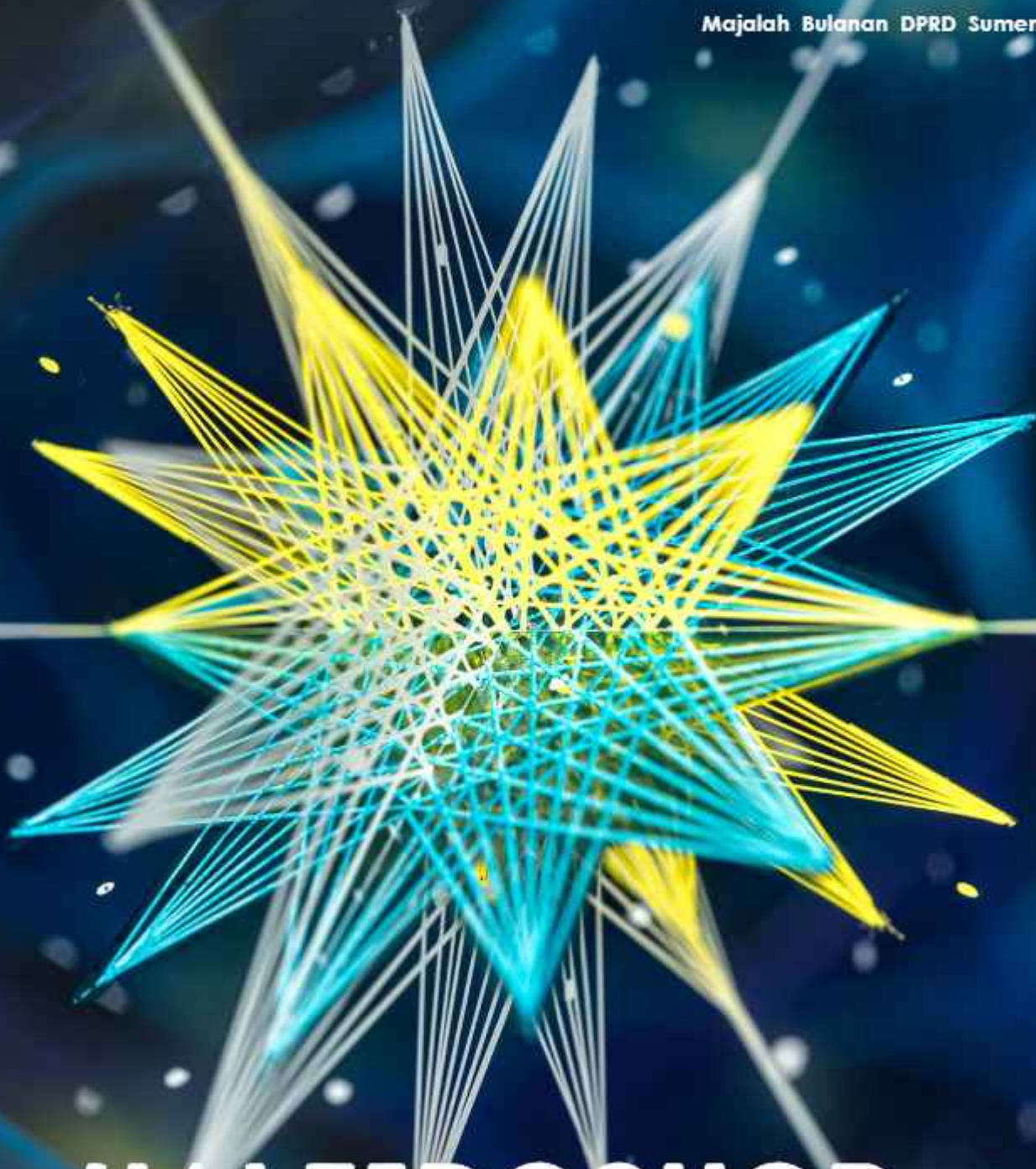


EDISI 12 | DESEMBER 2025

# PARLEMEN

Majalah Bulanan DPRD Sumenep



## KALEIDOSKOP 2025



PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DPRD KABUPATEN SUMENEP  
MENGUCAPKAN

# SELAMAT HARI IBU

22 Desember 2025



Dari Redaksi

Pembaca yang budiman...  
Majalah Parlemen kembali hadir menyapa Anda semua. Seperti edisi sebelumnya, kami juga membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sumenep. Kami juga menerima tulisan berbentuk opini, artikel dan kolom. Anda bisa mengirimkan melalui:

Email:  
redaksi.majalahparlemen@gmail.com  
Website:  
www.dprd-sumenepkab.go.id  
SMS center:  
085942803888

Kami akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada para pihak. Termasuk, jika aspirasi tersebut disampaikan kepada SKPD di lingkungan Pemkab Sumenep.

Redaksi



## M A J A L A H PARLEMEN

**Penerbit:**  
Sekretariat DPRD Sumenep

**Pelindung:**  
Ketua DPRD Sumenep

**Pembina:**  
Yanuar Yudha Bachtiar, S.Pi., M.Si  
(Sekretaris DPRD Sumenep)

**Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab:**  
Hasan Bashri, SH  
(Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan)

**Dewan Redaksi:**  
Herman, S.Sos, M.Si  
(Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda)

Siti Hairunnisyak, SE  
(Perisalah Legislatif Ahli Muda)

Yuni Kumiawati, SH  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)

**Staf Redaksi:**  
Desy Warsiyanti, SE  
Ainur Rofiq, SH  
Mohammad Yahya N., S.Ap

**Reporter:**  
Salamet  
Andreas Nugroho, A.Md.Kom

**Fotografer:**  
Ibnu Fajar

**Desainer Grafis:**  
davproduction

**Alamat Redaksi & Sirkulasi:**  
Bagian Persidangan  
dan Perundang-undangan  
Sekretariat DPRD Sumenep  
Jalan Trunojoyo 124 Sumenep

# DAFTAR ISI

---

04

**Laporan Utama**  
Kawal Aspirasi Rakyat

11

**Fokus**  
Air Macet, Dewan  
"Tekan" PDAM

14

**Parlementaria**  
Minta Buat Perbup untuk  
Lima Perda Baru

16

**Parlementaria**  
Dewan Ingatkan Distribusi  
Pupuk Sesuai Aturan

18

**Parlementaria**  
"Eksekusi" Perda Perlind-  
ungan Nelayan Disoal

20

**Parlementaria**  
Dewan Tindaklanjuti  
Dugaan Pengondisian  
PKH

26

**Eksplor Wisata**  
Pulau Oksigen Bikin  
Awet Muda

28

**Tempo Doeloe**  
Mengenal Pasukan  
Tempur "Korps Barisan"

30

**Artikel**  
Komunikasi Sebagai Pen-  
jaga Moral dan Cahaya  
Kehidupan

32

**Artikel**  
Madu Menuju Surga  
The Mee Is Three



HASAN BASHRI, SH  
Pemimpin Redaksi

**P**erlahan tapi pasti, majalah Parlemen terus menyapa warga Sumenep dengan mengabarkan berbagai aktivitas anggota DPRD, baik berupa narasi maupun kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2025. Harapannya, informasi itu sampai kepada publik, dengan keinginan menunjukkan kinerja yang baik. Sehingga, memberikan image positif kepada para wakil rakyat itu.

Di penghujung tahun ini, anggota dewan banyak menunjukkan kinerja baik. Itu bisa dilihat dari kerja nyata. Pada bidang legislasi, anggota dewan sudah banyak menuntaskan berbagai raperda (rancangan

peraturan daerah) -meski tidak semua-, tapi ikhtiar pembahasan itu dilakukan. Kalau di penganggaran pasti klir, karena itu kewajiban. Tahun ini, anggota dewan juga intensif melakukan pengawasan kegiatan daerah.

Semua itu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab kepada publik. Sehingga, kegiatan itu terus disampaikan, disuarakan dan didistribusikan kepada publik melalui majalah Parlemen ini. Dan, tahun depan majalah DPRD ini akan terus menyapa publik dengan berbagai kegiatan DPRD, tentu dengan sentuhan inovasi yang lebih berkesan. Semoga!

# AKHIRNYA, SUMENEP PUNYA ATURAN PERHUBUNGAN DARAT

Anggota dewan memberikan kado istimewa di awal tahun kepada masyarakat Sumenep. Sebab, mereka berhasil menuntaskan sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang sudah dibahas. Salah satu rancangan regulasi yang berhasil dituntaskan adalah raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat. Diharapkan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di Kabupaten ujung timur Pulau Madura itu.





Raperda itu dianggap sangat penting untuk digenjut pembahasannya karena sangat mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat. Maka, perlu dilakukan langkah cepat agar aspek kemanfaatan cepat dirasakan. Salah satu point dasar dalam raperda itu pengaturan Mobil Berpenumpang Umum (MPU). Sebab, mobil jenis "taxi" masih banyak beroperasi dan melintas di sepanjang jalan di wilayah kota Sumekar.

Salah satu yang perlu dibahas berkaitan dengan kelayakan pada mobil tersebut. Sebab, sepertinya sudah banyak yang keluaran tahun lama, bahkan kondisi fisiknya –secara kasat mata- sudah sangat jelek, namun tetap saja dioperasikan oleh pemiliknya. Maka, diperlukan pengaturan standar kelayakan mobil untuk dioperasikan. Dengan begitu, bisa meminimalisir masalah atau gangguan selama perjalanan.

Itu semua dilakukan untuk kenyamanan dan keselamatan penumpang. Dalam hal itu maka diperlukan pengujian secara intens terhadap keberadaan MPU tersebut. Itu dilakukan agar pemerintah tidak mengalami kecolongan dengan para sopir taxi. Apabila ditemukan usia kendaraannya tidak memenuhi standar maka hendaknya dilakukan peremajaan dengan teknis dan aturan yang berlaku. Sehingga, bisa layak digunakan.

Selain itu, raperda tersebut memastikan dalam melakukan aktifitas transportasi bisa memberikan jaminan keselamatan bagi penggunanya. Sehingga, masyarakat tidak merasa was-was. Sikap tegas pemkab tentu sangat diharapkan. Selain persoalan kendaraan, maka fasilitas umum juga harus diperhatikan agar bisa memadai. Yang paling pokok adalah persoalan jalan umum, di mana harus dipastikan bagus dan mulus.

Di daerah perkotaan mungkin tidak perlu diragukan, hampir semua jalan sudah mulus karena pemeliharanya maksimal. Namun, jalan di beberapa pelosok masih memerlukan perbaikan, utamanya antara kecamatan. Masih ada saja jalan yang rusak dan belum sentuh perbaikan, termasuk jalan Kabupaten. Padahal, jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan benar. Jalan rusak apalagi sampai lubang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Dengan begitu, jalan juga bisa menjadi faktor yang mendukung terciptanya keselamatan berkendara. Sehingga, anggaran untuk infrastruktur jalan tentu harus dimaksimalkan agar pembangunan lebih merata dan menyeluruh. Apalagi, protes terhadap jalan sering dilontarkan oleh masyarakat. Dalam konteks raperda ini, tentunya jalan yang dilewati kendaraan umum terlebih adalah taxi.

Disamping itu, penerapan teknologi informasi

komunikasi juga menjadi sangat penting. Juga, Intelligent Transportation Systems (ITS) untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi lalu lintas, hingga meningkatkan keselamatan. Kondisi jalan raya bisa dimonitor dengan baik, utamanya terkait dengan kemacetan. Misalnya, yang cukup sering terjadi di Pandian, di mana mobil barang masuk ke lokasi tersebut dan menyebabkan kemacetan yang menuai protes warga.

Kemudian, dalam pelaksanaan angkutan darat mulai diterapkan e-ticketing, monitoring kendaraan secara real-time. Itu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses tiket. Masyarakat tidak perlu datang ke lokasi maupun tempat loket cukup memakai aplikasi saja. Warga hanya tinggal di rumah dan sudah mendapatkan tiket. Termasuk juga penggunaan teknologi lain yang bisa membantu untuk mencegah atau menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan di jalan raya.

Masih banyak point-point lain dalam raperda yang dibahas oleh panitia khusus (pansus) yang dipimpin oleh Wiwid Harjo Yudanto itu. Tentunya, yang berkaitan dengan pengaturan dan afektifitas dalam hal angkutan darat. Oleh karenanya, raperda tersebut hendaknya bisa ditaati atau dipatuhi oleh

semua lapisan masyarakat, baik pengguna, sopir maupun pemilik angkutan umum.

Sebab, keberadaan transportasi darat memegang peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Hal ini menjadi faktor keselamatan yang merupakan muara utama dalam penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Sumenep. Tatanan ideal itu akan terwujud apabila ada koordinasi, komitmen, dan kolaborasi yang kuat dan nyata antar pemangku kepentingan.

"Yang terpenting adalah mampu memberikan manfaat untuk masyarakat dan pemangku kebijakan. Semoga raperda ini segera dieksekusi di lapangan agar terasa oleh masyarakat. Semua itu akan berjalan jika memiliki kemauan yang sama untuk berbuat lebih baik juga menjadi poin penting untuk merealisasikannya," kata Ketua Pansus Wiwid Harjo Yudanto.

#### Dinamika Pembahasan

Raperda penyelenggaraan Perhubungan Darat ini tuntas dibahas melalui proses yang panjang, tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Namun, melalui perjuangan yang luar





biasa. Apalagi, raperda tersebut berkaitan dengan kebutuhan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga, dibutuhkan kejelian dalam menentukan arah kebijakan agar antara kebutuhan masyarakat dengan pemerintah bisa sinkron alias sesuai.

Berbagai dinamika terjadi untuk sampai pada titik klimaks. Perdebatan di internal pansus akibat tidak satu visi dan persepsi menjadi warna yang sering terjadi. Sehingga, pembahasan harus dihentikan sementara untuk menambah pengetahuan agar terjadi dialog yang bisa diterima oleh semua kalangan. Sebab, analisis masing-masing anggota itu memiliki dasar yang kuat, termasuk mengacu kepada regulasi atau aturan yang sudah ditentukan.

Maka, ketika tidak menemukan titik terang diperlukan pengetahuan lebih detil dan rinci. Maka, anggota pansus melakukan konsultasi dengan instansi yang ada di atasnya. Tidak segan-segan untuk mendatangi pemrov Jatim, termasuk juga instansi pusat, semisal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan instansi lain yang dianggap penting dan relevan dengan raperda yang sedang dibahas. Itu semua dilakukan agar raperda tersebut on the track, tidak menimbulkan masalah ketika sudah

selesai dibahas.

Instansi terkait Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (disperkimhub) Sumenep juga tidak lepas dari panggilan pansus. Sebab, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) itulah yang mengerti tentang tata laksana transportasi darat. Penjelasan terperinci harus diperoleh dari



instansi tersebut. Maka, wajar jika instansi tersebut menjadi teman diskusi untuk membelegiti naskah akademik tersebut.

Sebenarnya, raperda tersebut sudah dilakukan pembahasan sejak 2022 lalu, namun sempat terhenti dan otomatis tidak selesai. Sehingga, dilakukan penjawalan ulang, sehingga bisa dituntaskan pada awal tahun ini. Intinya, segala ikhtiar dilakukan oleh anggota dewan untuk menuntaskan raperda yang dianggap mendesak itu. Terbukti, rancangan aturan itu bisa diselesaikan dengan sempurna dan tinggal menunggu eksekusi.

"Alhamdulillah, pembahasan sudah selesai setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan. Namun, untuk masyarakat Sumenep, harus tetap semangat dalam menuntaskan raperda dimaksud. Semoga segala ikhtiar yang telah dilakukan anggota dewan yang tergabung dalam pansus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Sumenep," tegasnya. \*



**WIWID HARJO YUDANTO**  
KETUA PANSUS

“

*Yang terpenting adalah mampu memberikan manfaat untuk masyarakat dan pemangku kebijakan. Semoga raperda ini segera dieksekusi di lapangan agar terasa oleh masyarakat.”*

# TATIB

## PEDOMAN KERJA

### ANGGOTA DPRD SUMENEP

Perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Sumenep tuntas dibahas. Rancangan regulasi tersebut merupakan program prioritas yang harus dituntaskan dengan cepat oleh para legislator. Sebab, akan menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi (tupoksi) serta tanggungjawab sebagai anggota dewan selama periode lima tahun ke depan, 2024-2029.



**S**etidaknya, dengan adanya tatib tersebut, "mobilitas" kerja di gedung parlemen bisa teratur, dan juga efisien. Sebab, itu akan dijadikan "kitab suci" dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Termasuk dalam menjaga marwah lembaga legislatif dengan kode etik yang ada tercantum di dalamnya. Dengan begitu, segala

tugas yang diemban akan mengacu kepada aturan alias on the track.

Sehingga, dalam menjalankan tugas kedewanan, tidak sebebas apa yang dipikirkan, melainkan terikat dengan aturan yang harus dipatuhi. Maka, mereka dipastikan akan bergerak dalam porsi kewenangannya. Dengan begitu, penyalahgunaan wewenang terhadap tugas

yang diembannya bisa diminalisir, karena mereka dipastikan tidak akan melabrak aturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama.

Terlepas dari semua itu, tatib DPRD sudah disahkan dan diberlakukan sebagai "hukum beracara" di gedung dewan. Itu karena sudah disetujui oleh Gubernur Jatim tertanggal 10 Desember 2024 dengan nomor 100.1.4.2/47059/001.2/2024. Fasilitasi Gubernur itu dilakukan setelah anggota dewan melalui panitia khusus (pansus) menuntaskan pembahasan. Dan, ternyata pembahasan disetujui oleh Gubernur lewat mekanisme fasilitasi.

Dengan begitu, pansus sukses mengantarkan rancangan tersebut menjadi perda. Itu akan menjadi pedoman standar bagi para anggota dewan. Tentunya, apabila aturan itu dilanggar maka ada konsekuensi yang harus diterima. Sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi, dalam menjalankan tanggungjawab sebagai anggota dewan, maka sudah pasti harus hati-hati dan memahamai tatib yang sudah dimiliki.



**DARUL HASYIM FATH**  
KETUA PANSUS TATIB



Memang, ada beberapa klasul yang dirubah atau ditambahkan dalam satu pasal di saat pembahasan tersebut. Sebab, itu dianggap penting dan menjadi kebutuhan dari regulasi itu. Maka, dibandingkan dengan periode sebelumnya, ada penambahan point di salah satu Bab dalam perda Tatib tersebut. Sementara mayoritas klausul dalam aturan itu masih sama dengan periode sebelumnya.

Salah satu perubahan yang ada dalam tatib itu berakaitan dengan Alat Kelengkapan DPRD (AKD). Salah satunya, di BAB IV bagian ke empat, yang mencamtumkan mitra masing-masing komisi. Komisi I, bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan dengan mitra kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi dan Informasi.

Kemudian, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Selanjutnya, Komisi II, bidang Ekonomi dan Keuangan dengan mitra kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan Komisi III bidang Pembangunan dan Infrastruktur dengan mitra kerja, Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Terakhir, Komisi IV, bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial dengan mitra kerja Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, RSUD dr. Moh. Anwar.

Selain itu, ada beberapa yang juga mengalami penambahan, misalnya pada BAB II yang mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Bahkan, untuk fungsi pembentukan raperda itu sampai mencapai 20 ayat. Itu dilakukan sebagai upaya untuk memperjelas rincian mekanisme pembentukan perda yang antara lain sebagian fungsinya dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Perda (Bapemperda).

Tidak hanya hanya pada BAB II, juga ada penambahan dua ayat pada BAB VI, yang berkaitan dengan hak anggota untuk membela diri atas dugaan pelanggaran sumpah atau janji dank ode etik sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan (BK). Berkaitan dengan kehadiran Bupati dalam rapat paripurna keputusan raperda apabila berhalanga tetap atau sementara, yang tertuang dalam BAB VII. Di mana dalam pasal 105 ada penambahan 4 ayat.

Paling terakhir yang mengalami perubahan, yaitu pada BAB VIII, yang mengatur tentang mekanisme



pengambilan keputusan khususnya pada pasal 131 dilakukan penambahan sebanyak 3 (tiga) ayat, antara lain mengatur ketentuan kuorum rapat alat kelengkapan DPRD dan keabsahan pengambilan keputusan.

Ketua Pansus Tatib DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menjelaskan, dengan kerja keras anggota DPRD yang tergabung dalam pansus akhirnya rancangan perubahan raperda tentang tatib berhasil diselesaikan. Itu semua atas kerja tim yang solid dan serius dalam menjalankan pembahasan. "Tidak butuh waktu lama untuk menuntaskan raperda itu. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah mensupport tuntasnya raperda itu," katanya.

Menurut dia, pembahasan tatib tersebut tidak berjalan mulus, karena banyak dinamika diaogis dalam setiap poin per point. Sebab, raperda itu berkaitan dengan internal anggota dewan, di mana hasilnya dipastikan akan mengikat dan menjadi

“

*Alhamdulillah dengan saling melengkapi, menghargai masing-masing pemikiran bisa dituntaskan dengan baik. Dan, fasilitasi Gubernur juga sudah selesai. Maka, tinggal eksekusi saja*

pedoman para anggota. Sehingga, pembahasannya cukup alot, dengan berbagai ide dan gagasan, yang bermuara kepada kebaikan anggota dan institusi. Setidaknya, dengan aturan itu bisa meningkatkan kerja kerakyatan yang lebih teratur dan efisien.

"Wajar terjadi dinamika dalam pembahasan, karena menyangkut dapur DPRD. Makanya, menyatukan kepentingan di atas bahasan raperda membutuhkan waktu. Tapi, Alhamdulillah dengan saling melengkapi, menghargai masing-masing pemikiran bisa dituntaskan dengan baik. Dan, fasilitasi Gubernur juga sudah selesai. Maka, tinggal eksekusi saja," tutur politisi PDI Perjuangan.

Politisi asal Kepulauan itu mengungkapkan, dengan tuntasnya raperda itu maka anggota DPRD sudah memiliki aturan dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Sebab, itu adalah kitab suci yang bisa dijadikan pedoman agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh seluruh anggota DPRD. Intinya, apabila mengacu kepada regulasi



yang sudah dibahas bersama, maka akan selamat dalam jalan juangnya.

"Semoga kita berhasil mengemban amanah dengan baik dan sempurna dengan mengacu kepada tatib yang ada. Semoga kita diberi kekuatan untuk menjalankan amanah rakyat," ungkap mantan aktivis Yogyakarta itu.\*



# DUA RAPERDA TUNTAS DIBAHAS

DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur berhasil menunjukkan kinerja yang cukup baik di pertengahan tahun. Utamanya, dalam bidang legislasi atau pembuatan undang-undang. Para legislator berhasil menuntaskan dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang sudah masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2025 itu. Itu setelah mereka melakukan pembahasan secara serius dan maksimal.



**M**emang, dalam beberapa bulan terakhir itu, wakil rakyat cukup fokus melakukan pembahasan terhadap dua raperda tersebut. Sebab, kedua rancangan regulasi itu mendapatkan atensi, otomatis harus segera dituntaskan. Apalagi, bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pembangunan di kabupaten ujung timur pulau Madura. Sehingga, harus digenjot.

Kedua raperda yang berhasil dituntaskan oleh anggota dewan itu adalah Raperda tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Rancangan peraturan itu, merupakan agenda tahunan yang menjadi kewajiban para anggota dewan sehingga selalu menjadi prioritas. Selain itu, ada raperda tentang pajak dan retribusi daerah, yang merupakan revisi dari perda nomor 1/2024. Dengan semangat para anggota, dua raperda itu berhasil diselesaikan.

Pembahasan kedua raperda itu terbilang cukup dinamis. Setiap anggota dewan memiliki sudut pandang yang berbeda tentang dua raperda itu. Sehingga, dialog dan perdebatan saat pembahasan terjadi. Bahkan, terbilang cukup alot. Apalagi, berkaitan dengan pertanggungjawaban APBD 2024, yang membutuhkan fokus karena berkaitan dengan realisasi kegiatan yang sudah berjalan. Untuk pembahasannya harus jeli, karena berkaitan

dengan dokumen yang memuat angka.

Di persoalan angka, ada sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp 259.791.308.933, dan apabila disandingkan dengan pembiayaan netto yang mencapai Rp 441.245.58.105. Jadi, pembiayaan netto jauh lebih tinggi dari silpa yang ada, sehingga dipastikan mengalami defisit. Jika



melihat angka tersebut, maka akan terungkap ada defisit sebesar Rp 181.454.199.171. Dengan begitu, defisitnya cukup tinggi.

Kendati demikian, di tahun 2024 Kabupaten Sumenep terbilang memiliki trend positif. Di mana silpa lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Di mana pada tahun 2023 terdapat silpa sebesar Rp 411.542.023.795. Nah, dari itu bisa disimpulkan jika ada fakta yang menunjukkan grafik lebih baik dalam pencapaian target pelaksanaan

pembangunan untuk anggaran di tahun 2024 lalu. Selain berkaitan dengan angka, para wakil rakyat kadangkala meluangkan waktu untuk turun ke lapangan. Itu dilakukan untuk mengkroscek kegiatan di lapangan sebagai upaya untuk sinkronisasi dengan ang ada dalam dokumen. Misalnya, mereka turun ke lapangan untuk mengecek pembangunan fisik, seperti gedung dan infrastruktur lainnya. Termasuk juga, program bantuan untuk memastikan tepat sasaran, waktu dan manfaatnya. Sehingga, diperlukan untuk bertemu dengan penerima manfaat.

Jadi, pembahasan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan butuh perjuangan dan keseriusan yang luar biasa dari anggota dewan. Tanpa semangat dan kemauan yang cukup tidak akan akan berhasil menyelesaikan raperda tersebut. Mereka harus meluangkan banyak waktu untuk menyelesaikan pembahasan. Kadangkala waktu libur juga dimanfaatkan untuk melakukan pembahasan.

Terlepas dari semua itu, anggota dewan berhasil menuntaskan raperda pertanggungjawaban APBD itu. Ada beberapa catatan yang disampaikan dari pembahasan tersebut salah satunya, pemerintah diminta untuk meningkatkan PAD (pedapatan asli daerah). Sebab, PAD jika dilihat dalam APBD masih terlihat stagnan atau jalan di tempat, dan tidak ada





kemajuan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan, rekomendasi atau catatan dari anggota dewan masih sama dengan tahun lalu, berkaitan dengan PAD.

Maklum, anggota tampaknya merasa gerah dengan sikap eksekutif yang terkesan tidak begitu memerhatikan persoalan PAD. Di mana harus berpikir kreatif dan inovatif dalam menggenjot PAD. Bukan hanya menoton di satu objek setiap tahun. Bayangkan, pemerintah berkutat pada sektor pajak untuk menopang PAD. Langkah tersebut tentu saja dinilai tidak kreatif, dan bahkan bisa saja membebani masyarakat. Maka, dibutuhkan terobosan baru, lahan baru untuk berkembang di sektor PAD.

### RAPERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Raperda pajak dan retribusi daerah juga berhasil diselesaikan dengan baik. Keberadaannya sangat penting, karena salah satu faktor pendorong strategis peningkatan PAD di Kota Sumekar. Sehingga, keberadaan regulasi itu menjadi sangat penting. Raperda itu hanya sebatas menyempurnakan dengan tuntas perkembangan regulasi yang ada, maka

diperlukan review atas raperda yang sudah ada, yakni nomor 1/2024.

Harus diakui, persoalan pajak dan retribusi adalah salah satu bentuk mengukur pelayanan publik melalui penguatan kapasitas fisik daerah. Ketika ruang fiskal daerah baik, akan berpengaruh kepada pembangunan di sebuah daerah tersebut. Indikasinya, adalah PAD yang semakin meningkat. Maka, lewat raperda diharapkan mampu mendorong peningkatan PAD yang bermuara untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten dengan logo kuda terbang itu.

Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin menjelaskan, pihaknya sangat bersyukur karena pembahasan dua raperda itu sudah berhasil diselesaikan oleh anggota dewan, yang dibahas oleh pansus (panitia khusus). Mereka sudah bekerja cukup serius dan maksimal. Bahkan, pembahasan dilakukan secara maraton agar bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. "Kami bekerja maksimal agar dua raperda itu bisa diselesaikan sesuai deadline yang ditentukan. Di antara kesibukan lainnya, dewan berlibat dan alhamdulillah berhasil menyelesaikan," katanya.

Dua Raperda itu, menurut Zainal, berhasil

diselesaikan lantaran kerja sama yang baik antara anggota wakil rakyat yang tergabung dalam masing-masing pansus tersebut. "Berkat kerjasama yang baik, akhirnya berhasil diselesaikan, dan pihak yang terkait untuk mensukseskan pembahasan tersebut. "Kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan kerja keras dalam mensekusi pembahasan dua raperda itu," tuturnya.

Memang, sambung dia, pembahasan itu dijadikan prioritas, karena dianggap sangat mendesak. Pertanggungjawaban APBD berkaitan dengan kewajiban tahunan, yang tidak bisa ditunda, maka perlu pembahasan cepat. "Sementara untuk raperda pajak dan retribusi itu berkaitan dengan kepentingan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Sumenep," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, pihaknya berharap dengan tuntasnya dua Raperda tersebut bisa memberikan manfaat yang baik bagi pemerintah dan masyarakat. Utamanya, untuk pembangunan yang lebih baik di Kota Sumekar itu. "Tinggal akan kami kirim ke Gubernur Jatim untuk dilakukan evaluasi, baru nanti dibahas hasil evaluasinya, yang kemudian disahkan menjadi perda," ungkapnya. \*




ZAINAL ARIFIN  
KETUA DPRD SUMENEP



# RPJMD

## UNTUK PEMBANGUNAN SUMENEP



DPRD Sumenep membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun 2025 hingga 2029. Pembahasan dilakukan melalui panitia khusus (Pansus). Itu dilakukan agar pembahasan bisa dilakukan dengan fokus, detail, dan terarah. Sehingga, hasilnya lebih berkualitas untuk pembangunan di Kabupaten ujung timur Pulau Madura itu.

Pembahasan RPJMD itu dilakukan secara intens dan maraton. Sebab, para anggota dewan menginginkan raperda tersebut untuk segera diselesaikan, apalagi terbatas oleh waktu. Sehingga, anggota dewan memusatkan perhatian untuk bisa menuntaskan RPJMD sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati di Badan Musyawarah (Bamus). Penuntasan secara tepat menghindari sanksi.

RPJMD itu sangat penting, tidak hanya sekadar menjadi dokumen biasa, melainkan fondasi pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan. Sehingga, membutuhkan atensi khusus, karena menyangkut pembangunan daerah. Arah pembangunan di daerah, khususnya di Kabupaten Sumenep sudah mulai terlihat dari RPJMD yang dimiliki. Itu meliputi segala sektor pembangunan termasuk tata kelola pemerintahan.

Isu penting dalam bahasan itu cukup kompleks, meliputi berbagai isu strategis yang dimasukkan dalam RPJMD tersebut. Tentu saja, berkaitan dengan konteks masyarakat di Kota Sumekar. Isu strategis itu



salah satunya berkaitan dengan penguatan sektor agrikultur dan kelautan, pembangunan infrastruktur antar wilayah. Persoalan penanggulangan kemiskinan juga tidak lepas dari perhatian. Ada juga pemberdayaan ekonomi lokal serta mitigasi dampak perubahan iklim.

Tentu saja, bahasan dalam dokumen RPJMD itu tidak lepas dari visi dan misi bupati dan wakil bupati (Wabup) terpilih yang sudah dilantik pada Februari lalu. Visi dan misi adalah pembuka dan menjadi perencanaan awal dalam menyusun rancangan

terseut. Itu sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025.

Dalam konteks ini, visi kepala daerah itu adalah sumenep unggul mandiri dan sejahtera". sedangkan misi, yang merupakan penjabaran dari visi, terdapat 5 (lima) misi pembangunan yaitu, membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing bidang pendidikan, kesehatan dan ketenaga kerjaan; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir.

Kemudian, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan berazas gotong royong dan berkearifan lokal; dan memperkuat pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan.

Itulah yang menjadi pijakan awal dalam RPJMD itu yang dibahas oleh anggota DPRD Sumenep. Sehingga, isi dari regulasi yang dibuat nantinya tidak menyimpang dari tujuan visi dan misi pasangan Achmad Fauzi Wongsojudo dan Imam Hasyim sebagai kepala daerah. Kendati demikian, dalam penyusunannya pun terdapat beberapa indikator yang salah satunya IPM (Indeks Pembangunan Manusia),



Persentase penduduk Miskin, laju pertumbuhan ekonomi dan indikator lainnya.

Secara sederhana RPJMD itu akan menjadi dasar pijakan dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep dalam jangka lima tahun ke depan. Sehingga, pembahasan raperda itu tentu tidak main-main melainkan membutuhkan keseriusan karena menyangkut hidup orang banyak. Oleh karena RPJMD oleh anggota DPRD dianggap sangat penting untuk dibahas dahulu agar arah pembangunan semakin jelas dan berkelanjutan.

Keseriusan anggota dewan dalam membahas itu ternyata berhasil. Pansus yang ditunjuk sukses menuntaskan RPJMD dalam waktu yang ditentukan hingga sampai pada titik akhir berupa paripurna laporan pansus. Tentu saja, untuk sampai pada titik itu tidak mudah, melainkan membutuhkan kerja yang cukup panjang. Di mana pembahasan dimulai dari nota penjelasan bupati, pandangan umum fraksi, jawaban bupati hingga pembahasan di pansus.

Tentu saja, proses pembahasan itu cukup panjang dan melelahkan. Kendati demikian, para anggota dewan tetap berhasil menyelesaikan pembahasan itu. Dinamika itu hal biasa, dan bisa dilalui dengan baik. Sehingga, pada akhirnya para legislator itu bisa bernapas lega setelah pembahasan selesai.

#### Catatan Pansus

Juru bicara pansus Ahmad Juhairi, pihaknya sudah berhasil menyelesaikan pembahasan menyeluruh terhadap Raperda RPJMD oleh Pansus DPRD. Pembahasan telah selesai tepat waktu sesuai jadwal yang telah dialokasikan. Pansus memberikan catatan dalam pembahasan itu. Salah satu poin penting adalah proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5 persen hingga tahun 2030.

Sementara Belanja Daerah juga diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 0,68 persen dari tahun 2025 ke tahun 2030. Fokus belanja tersebut diarahkan pada delapan program unggulan yang menjadi prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan. "Dengan kenaikan itu diharapkan bisa mampu memberikan manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Sumenep," tegasnya.

Selain itu, pansus DPRD secara khusus juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Kabupaten



Sumenep sebagai wilayah kepulauan dengan 126 pulau. Pihaknya meminta pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan advokatif kepada pemerintah pusat agar perhatian khusus diberikan terhadap pembangunan wilayah kepulauan.

Persoalan kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan harus menjadi prioritas utama. Infrastruktur jalan, ketersediaan dermaga, hingga pembangunan pos keamanan laut harus segera diwujudkan, termasuk peningkatan layanan listrik dan pelayanan publik di wilayah kepulauan. "Saat ini adalah momentum untuk mengikis sekat perbedaan pembangunan antara daratan dan kepulauan. Itu harus ada komitmen dari pemerintah," tegasnya.

Rekomendasi lain, menurut Juhairi menekankan pentingnya pembangunan non-fisik melalui pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), selaras dengan visi besar pemerintah kabupaten. Pansus juga merekomendasikan peningkatan PAD melalui regulasi tata kelola aset daerah secara produktif agar dapat memberikan kontribusi di luar sektor pajak dan retribusi. DPRD menilai bahwa kemandirian fiskal daerah akan bergantung pada efektivitas pengelolaan sumber daya lokal.\*



# LIMA KOMISIONER KI DITENTUKAN

Proses seleksi Komisioner Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep terus berlanjut. Kali ini, bola panas rekrutmen itu berada di gedung DPRD, di jalan raya Sumenep-Pamekasan, Gedungan. Di mana, Komisi I melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada kandidat yang sudah melewati tahapan seleksi yang dilakukan eksekutif, mulai pendaftaran hingga tes akhir.





**A**da sekitar 11 nama yang dinyatakan lolos untuk mengikuti fit and proper test di gedung parlemen itu. Mereka adalah Hasdani Roy, Imam Syafi'e, Achmad Ainal Horri, Badrul Akhmadi, Mukh Anif, Winanto, Muhammad Harun, Adnan AR, Kamarullah, Rifa'i, dan Sufiyanto. 11 orang itu dianggap sudah layak untuk mengikuti proses di legislatif, karena berbagai tahapan sudah dilalui dengan sempurna. Sehingga, mereka dianggap kapabel berhadapan dengan anggota dewan.

Pelaksanaan fit and proper test calon komisioner KI ini secara simbolis dibuka secara langsung oleh ketua komisi I, yang membidangi pemerintahan, Darul Hasyim Fath. Setelah itu baru digelar acara inti uji kepatutan dan kelayakan. Pelaksanaannya dilakukan secara bergantian, dipanggil satu-satu di dalam ruangan. Di dalam ruangan satu orang itu menyampaikan visi dan misinya ketika terpilih nantinya, termasuk apa yang akan dilakukan.

Usai pemaparan dari calon komisioner, dengan durasi yang diberikan pimpinan komisi. Maka, giliran anggota komisi I secara bergantian bertanya untuk "menguji" calon komisioner. Setidaknya, para legislator mendalami visi yang disampaikan, termasuk materi yang berkaitan dengan peraturan dan "kebijakan" Komisi Informasi ke depan. Bahkan,

apa yang akan dilakukan nantinya jika terpilih tidak lepas dari pertanyaan para wakil rakyat itu.

Seluruh anggota komisi I cukup antusias untuk menanyakan berbagai hal berkaitan dengan KI. Sebab, mereka memiliki tanggungjawab untuk memastikan lahirnya calon komisioner yang kapabel, berkualitas dan berintegritas. Termasuk dalam mengawal keterbukaan informasi publik di



Kabupaten ujung timur Pulau Madura itu. Memastikan komisioner yang baru mampu memberikan warna yang baik untuk keterbukaan informasi publik.

Sebab, keterbukaan informasi publik adalah suatu hal yang wajib dilakukan dalam negara demokrasi. Itu dilakukan sebagai wujud komitmen akuntabilitas pelayanan publik di Kota Sumekar. Pengawasan tersebut tentu harus dilakukan oleh para legislator, yang menjadi penentu pada proses "penentu" komisioner KI melalui fit and proper test. Sehingga, wajar jika para anggota dewan itu cukup serius dalam mempertanyakan setiap visi calon komisioner dimaksud.

Menariknya, pelaksanaan fit and proper test kali ini berbeda dengan periode sebelumnya. Di mana pelaksanaannya lebih terbuka. Sebab, DPRD menyiarkan secara live (langsung) pelaksanaan tes tersebut. Sehingga, bisa disaksikan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di kota Sumekar. Otomatis, pelaksanaan itu lebih transparan, terbuka kepada publik. Publik juga bisa memberikan penilaian kepada calon komisioner tersebut.

Langkah komisi itu juga menuai respon positif dari publik. Di mana warga menilai pelaksanaan fit and proper test cukup baik. Sebab, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang kemudian diputuskan di balik meja. Dengan siaran langsung



melalui kanal youtube menandakan jika proses yang dilakukan berlangsung terbuka dan fair. Langsung bisa dipantau oleh publik.

Setelah proses cukup panjang selama berjam-jam, akhirnya fit and proper test tuntas digelar oleh anggota dewan yang ada di komisi I. Nah, setelah itu maka digelar rapat pleno untuk menentukan lima komisioner KI yang dianggap "memenuhi syarat" versi dewan untuk melenggang sebagai komisioner





**DARUL HASYIM FATH**  
KETUA KOMISI I

terpilih. Pleno itu diikuti oleh seluruh anggota komisi. Pelaksanaan pleno berlangsung cukup alot namun akomodatif.

Nah, setelah pleno digelar maka akhirnya muncul konsensus atau kesepakatan lima komisioner terpilih. Lima komisioner terpilih itu adalah Ahmad Ainol Horri, Hasdani Roi, Kamarullah, Rifa'i, dan Winanto. Kelima orang itu terpilih karena dianggap kapabel dan paling baik di antara 11 orang yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Sehingga, lima orang itu nanti yang akan dibawa dalam sidang paripurna.

Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, mengatakan, setelah pelaksanaan fit and proper test digelar rapat pleno. Dan, dalam rapat pleno itu diputuskan lima orang yang dianggap layak untuk menjadi komisioner KI. "Uji kelayakan dan kepatutan sudah selesai. Dan, sudah diputuskan untuk memilih lima nama itu. Ke lima orang itu sudah menjadi kesepakatan anggota di komisi I," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam sistem pemerintahan demokratis modern. Menurutnya, prinsip ini menjadi penanda berakhirnya



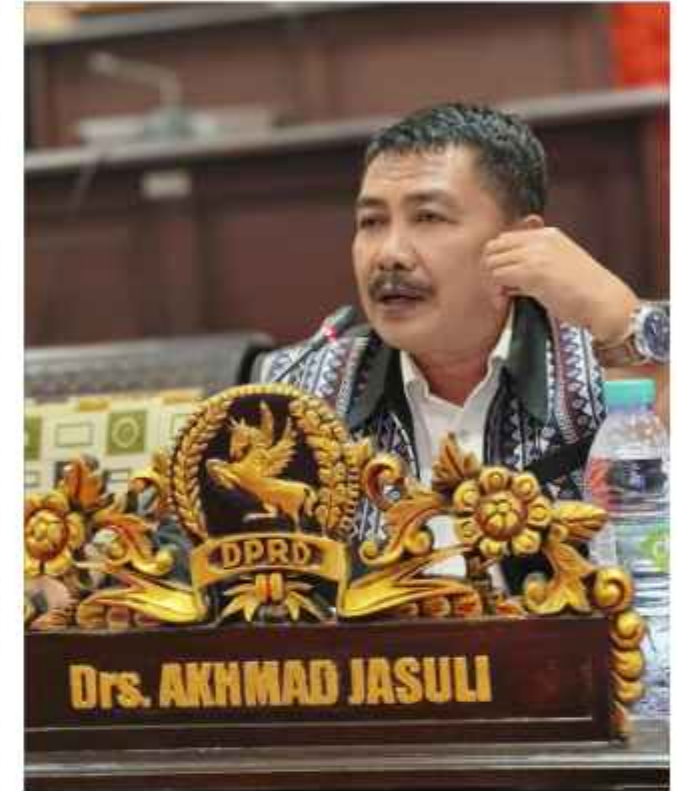
pola pemerintahan tertutup yang bersifat monarki dan absolut. "Keterbukaan informasi publik adalah kewajiban mutlak di negara demokratis. Prinsip ini tidak hanya soal modernisasi politik, tetapi juga penghormatan terhadap hak asasi manusia," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menekankan, konstitusi telah menjamin hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi tersebut secara luas dan transparan.

Ia juga memastikan bahwa pelaksanaan fit and proper test secara terbuka menjadi wujud komitmen DPRD terhadap akuntabilitas publik. Setiap calon diminta memaparkan visi, misi dan rencana kerja jika terpilih memimpin KI Sumenep. "Proses ini bukan sekadar formalitas, tetapi tanggung jawab kita kepada publik. Para calon komisioner harus siap memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi di Sumenep," tuturnya.

Komisi Informasi Kabupaten Sumenep nantinya akan berperan penting dalam memastikan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menyelesaikan sengketa informasi, serta mendorong pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.

\*\*\*\*\*



Tahapan rekrutmen Komisi Informasi (KI) oleh Pemkab Sumenep dimulai sejak April 2025. Ada sekitar 19 peserta yang dinyatakan lolos administrasi dari 58 pendaftar. Baru, pada bulan Juni, panitia menggelar tes tulis dengan sistem CAT (Computer Assisted Test). Dari hasil tes tersebut, ada empat orang dinyatakan tidak lulus. Dengan begitu, yang berhak melanjutkan ke tahapan selanjutnya sebanyak 15 orang.

Kemudian, 15 orang yang dinyatakan lolos itu akan memasuki tes berikutnya, yakni psikotes dan wawancara. Nah, pada bulan Juli digelar tes wawancara. Hasilnya, 4 orang dinyatakan tidak lulus. Dengan begitu, 11 orang calon komisioner dipastikan bisa mengikuti tahapan selanjutnya, yakni uji publik di gedung DPRD. Sehingga, mereka yang lulus diminta untuk membuat makalah yang berisi visi dan misi untuk diserahkan ke DPRD. Dan, baru Agustus, legislator menggelar uji publik, dan diputuskan lima orang terpilih. \*



**PENINGKATAN  
PAD HARUS  
JADI ATENSI!**



**Persoalan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tampaknya menjadi isu yang paling sering dilontarkan oleh para anggota DPRD Sumenep. Sebab, mereka menganggap kenaikan pendapatan tidak begitu signifikan, bahkan terkesan jalan di tempat. Padahal, setiap tahun para legislator selalu mengingatkan pemerintah agar PAD menjadi atensi supaya terjadi lonjakan signifikan.**

**N**yatanya, masalah klasik itu kembali muncul di pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026. Bagi wakil rakyat, peningkatan

PAD itu perlu penekanan dan keseriusan, sehingga cita-cita menjadi Kabupaten yang mandiri yang terwujud. Namun, jika tidak ada peningkatan yang signifikan, maka sudah pasti Kabupaten mandiri itu hanya menjadi impian saja.

Maka, menjadi wajar apabila dalam saran yang dinyatakan secara tertulis oleh Badan Anggaran (Banggar) untuk berupaya meningkatkan PAD. Hal itu berlaku kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menjadi pengumpul pendapatan. Dengan kata lain, instansi tersebut tidak hanya sekadar memenuhi target yang ditentukan di awal perencanaan, melainkan harus berkreasi agar melebihi target.

Dengan kata lain instansi pengumpul pendapatan itu tidak hanya sekadar "memenuhi", namun harus melampaui. Makanya, diperlukan kerja-kerja serius, bukan hanya dibalik



meja. OPD harus mampu menangkap peluang baru yang bisa melahirkan pendapatan bagi daerah. Sebab, masih banyak instansi pemerintah yang bekerja formalitas saja, sehingga setiap tahun objek pendapatannya sama, tidak ada inovasi apapun.

Oleh karena itu, ke depan pemimpin daerah untuk selalu menekan instansi dalam meningkatkan kinerja dalam peningkatan PAD. Dan, tidak setengah hati. Apabila ditemukan hanya kerja formalitas saja, maka bisa dilakukan evaluasi. Artinya, periode kedua kepala daerah bukan lagi lip service, melainkan harus kerja nyata menuju Kabupaten Mandiri dengan PAD yang tinggi.

Salah satu yang menjadi catatan Banggar adalah kegiatan event tahunan yang digelar oleh Disbudporapar (Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata). Di mana setiap tahun ratusan event yang digelar, namun tidak mampu mendongrak PAD Sumenep. Sehingga, perlu

dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan kegiatan, supaya tidak sekadar menjadi seremonial belaka.

Event yang digelar itu harus dipandang dengan cara ekonomi, melalui analisis cost benefit. Di mana event yang dilaksanakan menggunakan dana negara, maka juga memberikan pemasukan yang bagus dalam berkontribusi untuk peningkatan pendapatan daerah. Sehingga, keberadaan event itu tidak hanya sekadar menyedot anggaran, tapi memberikan feedback ke daerah dalam bentuk pendapatan.

Sehingga, dalam pelaksanaan event tersebut harus inovatif dan kreatif. Menurut Banggar, salah satu contoh strategi adalah menggelar even-even yang berskala nasional atau bahkan internasional. Harapannya, akan ada lonjakan kenaikan tingkat kunjungan dari daerah lain. Jadi, event itu tidak hanya sebatas hiburan dari lokal, melainkan meningkatkan kunjungan orang luar ke Kota Sumekar itu.



Banyaknya kunjungan itu akan berdampak. Salah satunya, akan memberikan peningkatan pada penerimaan Pajak Hotel, Pendapatan Parkir, tiket masuk tempat wisata dan lain-lain. Dan masyarakat juga akan menerima imbas baiknya contoh warung kuliner laris, souvenir-souvenir laku, dan UMKM akan lebih berkembang.

"Kami masih menekankan peningkatan PAD pada tahun 2026. Sebab, PAD itu hal penting bagi kabupaten untuk menjadi mandiri. Penekanan untuk meningkatkan PAD itu selalu disampaikan setiap tahun. Ternyata, belum dilaksanakan secara baik. Instansi pemerintah masih belum maksimal dalam mengumpulkan pundi-pundi

PAD," keta ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin.

Dia menuturkan, bupati, wabup, sekda dan instansi yang ada di lingkungan Pemkab Sumenep hendaknya kompak dan semangat untuk berkomitmen dalam meningkatkan PAD. Yaitu, melakukan kreasi dan inovasi. "Membuka ruang baru untuk peningkatan PAD, jangan hanya berkutat kepada yang sudah ada. Makanya, kami minta OPD itu kerja kreatif dan inovatif bukan hal yang sudah ada," tegas politisi PDI Perjuangan itu.

#### RAPBD 2026 TUNTAS DIBAHAS

Raperda APBD 2026 sudah tuntas dibahas di gedung DPRD Sumenep. Pembahasan secara maraton dilakukan oleh Banggar dan Tim Anggaran (Timgar). Pembahasan itu dimulai dengan penyampaian nota bupati atas raperda APBD, kemudian dilanjutkan dengan pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi, dan kemudian dilanjutkan kembali dengan jawaban bupati. Kemudian, dilakukan bahasan antara Banggar dan Timgar. Pembahasan RAPBD 2026 cukup dinamis. Terjadi perdebatan yang sangat krusial antara Banggar sendiri dengan timgar. Bahkan, kadangkala pembahasan tidak berjalan mulus, sehingga dibutuhkan penyamaan persepsi agar bisa dilanjutkan. Terlepas dari dinamika pembahasan, RAPBD 2026 sudah berhasil dituntaskan oleh Banggar dan sudah diparipulkan dihadapan anggota dewan dan eksekutif.

Dari pembahasan itu maka terungkap Target pendapatan pada APBD 2026 sebelum pembahasan TAPD dan Banggar direncanakan sebesar Rp 2.033.473.005.714. Namun, setelah pembahasan menjadi Rp 2.095.882.112.714. Perubahan tersebut disebabkan adanya penyesuaian pada sisi Dana Alokasi Umum sebesar (DAU) Rp 100.078.245.000 serta Dana Bagi Hasil yang mengalami penurunan sebesar Rp 37.669.138.000. Sementara untuk Pendapatan Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus belum teranggarkan dikarenakan masih menunggu hasil desk/sinkronisasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Teknis terkait.

Sementara dari sisi belanja di APBD 2026 sebelum pembahasan TAPD dan Banggar dianggarkan sebesar Rp 2.217.689.256.718 dan setelah pembahasan menjadi Rp 2.280.098.363.718. Perubahan tersebut teralokasikan untuk Penggajian P3K dan P3K Paruh Waktu; Penyesuaian ADD; serta Penambahan anggaran UHC. Sebab, di tahun 2025 teranggarkan sebesar Rp 91.982.525.900 dengan coverage cakupan total peserta sebesar 85%. Namun, di awal Tahun 2026 telah teranggarkan sebesar Rp 87.729.778.755. Untuk tetap mencapai predikat utama ada perubahan regulasi dimana coverage harus mencapai 95%, sehingga perlu penambahan). Untuk Belanja Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus belum teranggarkan dikarenakan masih menunggu hasil desk/sinkronisasi dengan Kemenkeu

dan Kementerian Teknis terkait.

Sedangkan sisi Pembiayaan dibagi dua, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Untuk Penerimaan Pembiayaan 2026 dianggarkan sebesar Rp 187.441.251.004 Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan netto pada APBD 2026 dianggarkan sebesar Rp 3.225.000.000. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa terdapat surplus Pembiayaan Netto sebesar Rp 184.216.251.004. •



## Galeri Foto



Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri bersama Anggota Menemui Aksi Unjuk Rasa dari Distrik Gerakan Mahasiswa Sumenep terkait Pengendalian Banjir, Senin, 03 November 2025



Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sumenep, Rasidi, menerima dan berdialog dengan massa aksi Aliansi BEM Sumenep yang menyampaikan aspirasi terkait penolakan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto karena dinilai memiliki catatan pelanggaran HAM, Kamis, 20 November 2025.





PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DPRD KABUPATEN SUMENEP  
MENGUCAPKAN

# SELAMAT *Natal*

dan Tahun Baru 2026